

DETERMINAN PERSEPSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS PENGGELAPAN PAJAK

Dwianto Mukhtar Latif, FEB Universitas Lambung Mangkurat
Widya Ais Sahla, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin
**Corresponding author: ais.sahla@akuntansipoliban.ac.id*

Info artikel

Riwayat artikel

Penyerahan Januari 2018

Diterima Maret 2018

Diterbitkan April 2018

Kata kunci: idealisme, relativisme, tingkat religiusitas, gender dan keputusan etis penggelapan pajak.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara orientasi etis (*ethical orientation*) yang ditandai dengan idealisme dan relativisme dengan pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini juga ingin menguji faktor-faktor individual seperti gender dan tingkat religiusitas sebagai penentu pengambilan keputusan etis. Survey dilakukan dengan menggunakan kuisisioner kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Teknik analisis yang akan digunakan adalah dengan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealisme tidak terbukti berhubungan negatif dengan keputusan etis penggelapan pajak. Sedangkan relativisme yang juga merupakan unsur orientasi etis terbukti berhubungan positif dengan persepsi keputusan etis penggelapan pajak. Tingkat religiusitas terbukti berhubungan negatif dengan persepsi keputusan etis penggelapan pajak. Gender juga terbukti mempengaruhi persepsi keputusan etis penggelapan pajak dimana responden wanita terbukti 6.5% lebih tinggi menilai bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis dibandingkan dengan responden pria.

Abstract

This study aims to test the relationship between ethical orientation characterized by idealism and relativism with ethical decision of tax evasion. In addition, the study also wanted to examine individual factors such as gender and the level of religiosity as a determinant of ethical decision making. The survey was conducted by using questionnaires to Accounting Department students Faculty of Economics and Business Universitas Lambung Mangkurat. The analytical technique to be used is by multiple regression. The results show that idealism is not proven to be related negatively to the ethical decisions of tax evasion. While relativism which is also an

element of ethical orientation proved to be positively related to the perception of ethical decisions of tax evasion. The level of religiosity proved to be negatively related to the perceptions of ethical decisions of tax evasion. Gender has also been shown to influence perceptions of ethical tax evasion decisions in which female respondents prove to

be 6.5% higher judging that tax evasion is unethical behavior compared to male respondents.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan terpenting bagi suatu negara dan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Menurut penjelasan atas Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem *self assessment* bertumpu pada *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) yang dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak.

Supramono dan Damayanti, (2010 hal: 5) menyebutkan terdapat dua jenis perlawanan yang mungkin timbul akibat dijalankannya sistem *self assessment*, yaitu: pertama, perlawanan pasif yang merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan untuk mempersulit pemungut pajak, dimana hambatan yang muncul bukan atas inisiatif wajib pajak tetapi mungkin muncul akibat kondisi ekonomi. Kedua, perlawanan aktif yang merupakan perlawanan wajib pajak yang dapat dilihat secara nyata, dilakukan dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak, misalnya perlawanan dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yang disebut sebagai *tax avoidance*

(penghindaran pajak) dan perlawanan dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan yang disebut dengan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Selain karena sifat pemungutannya yang sukarela, penggelapan pajak timbul akibat dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah dan sistem hukum. Spicer (1974) dan Hite (1990) (dalam Varosi, Klamm, dan McCrohan, 2000), ketika ditanyakan mengapa sistem pajak tidak adil, wajib pajak pasti menyebutkan individu yang kaya dan perusahaan besar mereka yakni hanya membayar pajak yang kecil bahkan tidak sama sekali. Song dan Yarbrough (1978) menyatakan bahwa wajib pajak merasa tidak percaya dengan sistem pajak dimana mereka mencurigai yang kaya umumnya melarikan diri dari kewajiban pajak melalui celah hukum yang ada.

Isu penggelapan pajak menjadi *trending topic* di berbagai media Indonesia beberapa waktu yang lalu, sebut saja kasus Gayus Tambunan seorang aparat pajak golongan IIIa yang memiliki rekening milyaran rupiah akibat tindakannya membantu para wajib pajak kelas kakap untuk melakukan penggelapan pajak. Bagi negara tindakan ini sangat merugikan, karena pendapatan yang seharusnya masuk kedalam kas negara yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia malah jatuh ke tangan yang tidak semestinya.

Namun bagaimana jika dilihat dari sudut pandang etika, apakah penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak etis? Bagaimana kalau pemerintah melakukan korupsi terhadap pajak yang telah dibayarkan? Atau bagaimana kalau hanya segelintir orang seperti Gayus yang justru menikmati uang hasil pungutan pajak?

Martin Crowe (1944 dalam Utami dan Widodo, 2015) yang menguji literatur filosofis dan teologi pada 500 tahun yang lalu, mengungkapkan bahwa terdapat tiga pandangan utama yang muncul mengenai penggelapan pajak. Sudut pandang yang pertama adalah penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak etis. Hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan suatu bentuk kewajiban kepada Tuhan dan juga merupakan suatu kewajiban kepada masyarakat. Pandangan yang kedua adalah penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang etis. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa pemerintah selaku pemungut pajak adalah pencuri, karena mereka memungut pajak tanpa adanya persetujuan dari wajib pajak serta hasil pajak yang diterima belum tentu jatuh ke tangan dan tempat yang semestinya. Oleh karena itu timbul pandangan bahwa untuk apa kita memberi harta kita kepada pencuri, sehingga melindungi harta kita dari tangan yang berbahaya merupakan perbuatan yang etis. Pandangan yang ketiga adalah penggelapan pajak terkadang merupakan perbuatan yang etis, dan terkadang merupakan perbuatan yang tidak etis. Dalam pandangan tersebut terdapat beberapa kewajiban etika yang harus kita junjung untuk mendukung pemerintah di suatu Negara tetapi kewajiban tersebut tidak absolut. Sehingga dalam hal ini etika mengenai penggelapan pajak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Penelitian mengenai pendapat dari mahasiswa strata 1 (S1) jurusan bisnis di Hong Kong Baptist University dan Barry University oleh McGee, et al., (2008)

menunjukkan meskipun penggelapan pajak adalah etis pada beberapa kasus dengan dukungan yang luas, namun ada juga perasaan yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah perbuatan yang tidak etis di beberapa kasus. Pendapat yang sangat kuat yang membenarkan penggelapan pajak adalah pada saat pemerintah suatu Negara korupsi dan pendapat yang sangat lemah mengenai penggelapan pajak yaitu ketika motif yang digunakan adalah untuk kepentingan pribadi.

Penelitian tersebut lebih melihat etis atau tidaknya suatu keputusan penggelapan pajak dilihat dari faktor lingkungan seperti keadaan pemerintah yang korupsi dan motivasi kepentingan pribadi wajib pajak. Padahal salah satu determinan penting perilaku pembuatan keputusan etis adalah faktor-faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan dan variabel-variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing-masing individu. Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan sejak lahir (gender, umur, tingkat pendidikan dan sebagainya). Berikut adalah penelitian mengenai faktor-faktor individual apa saja yang dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan etis.

Keller, et al., (2007) mengadakan penelitian dengan melihat pengaruh gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis para akuntan di Amerika. Hasilnya, terdapat perbedaan di dalam standar - standar etika berdasarkan gender, tingkat pendidikan, religiusitas, dan pengalaman kerja. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akuntan pria dan akuntan wanita. Religiusitas memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembuatan keputusan etis. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis.

Motivasi dari penelitian ini adalah pertama: ingin melihat hubungan antara orientasi etis (*ethical orientation*) yang ditandai dengan idealisme dan relativisme dengan pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak. Kedua: penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian McGee et al., (2008) dengan memasukkan faktor-faktor individual seperti gender dan tingkat religiusitas yang oleh Keller et al., (2007) telah diteliti sebagai faktor penentu pengambilan keputusan etis.

LANDASAN TEORI

Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka (Robbins, 1997). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan penginderaan, penginterpretasian, dan penafsiran pesan.

Gordon (1993) menyatakan persepsi sebagai proses indera menangkap rangsangan dari lingkungan nyata, kemudian dipahami dan menghasilkan wawasan manusia terhadap rangsangan tersebut. Sedangkan Matlin (1998) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang berasal dari panca indera.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti yang dimulai dari penerimaan rangsangan hingga digunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitar.

Etika

Istilah etika dan moralitas sering dipakai bersamaan dan sering dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan

begitu saja (Keraf, 1998, hal:13). Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *ethos* yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Moralitas berasal dari bahasa Latin *mos* atau *mores* yang juga berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Jadi, dalam pengertian pertama ini etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang *ajek* dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana *laiknya* sebuah kebiasaan (Keraf, 1998, hal:14).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Sedangkan menurut Velasquez (2006: 10) mendefinisikan etika sebagai: “*Ethics is discipline that examines one’s moral standards or the moral standards of a society*”. Etika dalam pengertian tersebut merupakan ilmu yang melibatkan suatu standar moral, standar moral memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Standar moral berkaitan dengan persoalan yang dianggap akan merugikan ataupun akan menguntungkan secara serius.
2. Standar moral tidak ditetapkan oleh hukum ataupun dewan otoritas tertentu, berbeda dengan standar hukum yang dilegitimasi oleh pembuat Undang-Undang dan para pemilih.
3. Standar moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain termasuk *self-interest* seseorang.
4. Standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak.

5. Standar moral dilekatkan dengan emosi atau perasaan tertentu. Misalnya ketika seseorang bertindak bertentangan dengan standar moral tertentu akan muncul perasaan bersalah, malu, menyesal dan lain sebagainya pada dirinya.

Beberapa konsep, teori atau mazhab etika yang banyak dijadikan acuan dalam literatur etika bisnis antara lain utilitarianism, deontologi, teori hak dan teori keutamaan (*virtue*). Utilitarianism, deontologi dan teori hak adalah pandangan yang didasarkan pada prinsip (*rule based*) dengan menyoroti perbuatan, sedangkan teori keutamaan (*virtue*) berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Seorang dikatakan baik menurut teori keutamaan apabila memiliki keutamaan dan hidup menurut keutamaan tersebut (Sitanela, 2010).

Pengambilan Keputusan Etis

Keputusan etis (*ethical decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral dapat diterima oleh masyarakat luas (Jones, 1991). Hal ini sejalan dengan Treviño, et al., (2006) yang melihat perilaku etis sebagai perilaku individu yang dinilai sesuai dengan norma yang berlaku umum. Beberapa *review* tentang penelitian etika mengungkapkan beberapa penelitian empirik tentang pembuatan keputusan etis. Salah satu determinan penting perilaku pembuatan keputusan etis adalah faktor-faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan dan variabel-variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing-masing individu. Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan sejak lahir (gender, umur, kebangsaan dan sebagainya). Sedangkan faktor-faktor lainnya adalah faktor organisasi, lingkungan. Penelitian tentang pengambilan keputusan etis, telah

banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan mulai dari psikologi sosial dan ekonomi. Beranjak dari berbagai hasil penelitian tersebut kemudian dikembangkan dalam paradigma ilmu akuntansi.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Supramono dan Damayanti, 2010). Dalam konteks Indonesia penggelapan pajak adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata cara perpajakan.

Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak / mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, salon, toko roti, rumah makan).

Pengembangan Hipotesis

Orientasi Etis (*Ethical Orientation*)

Forsyth (1980) mengemukakan bahwa orientasi etis (*ethical orientation*) yang disebutnya sebagai *ethical position* terdiri atas dua karakteristik yaitu idealisme (*idealism*) dan relativisme (*relativism*). Idealisme mengacu apabila individu percaya bahwa konsekuensi yang diinginkan selalu dapat diperoleh tanpa melanggar pedoman moral. Seorang yang idealis tidak

akan memilih perilaku negatif yang dapat mengganggu orang lain.

Relativisme mengacu pada sejauh mana seorang individu menolak aturan moral universal untuk memandu perilaku. Individu yang memiliki tingkat relativisme tinggi dalam menilai sesuatu cenderung menekankan pada aspek keadaan daripada prinsip etika. Idealisme dan relativisme adalah konstruk yang independen dan individu dapat tergolong dalam tinggi atau rendah pada kedua dimensi tersebut (Forsyth, 1980).

Orientasi Etis (*Ethical Orientation*) dalam Keputusan Etis

Teori etika bisnis secara umum berpendapat bahwa ketika menghadapi situasi keputusan etis, para eksekutif menerapkan pedoman etis yang dikembangkan dari filsafat moral Fernando, et al., (2008). Filsafat moral mengacu pada prinsip-prinsip atau peraturan yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang benar atau salah serta sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam pemodelan etika bisnis (Hunt & Vitell, 1986; Trevino, 1986).

Perspektif filsafat moral (idealism dan relativism) oleh Forsyth (1980) yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya menjadi ukuran yang populer dalam memprediksi penilaian moral (*moral judgement*). Orientasi etis yang diyakini oleh individu telah terbukti mempunyai hubungan yang positif terhadap keputusan etis (Husein, 2003). Namun, Yetmar dan Eastman (2000) menyebutkan bahwa orientasi etis tidak berpengaruh pada keputusan etis. Relativisme mempunyai hubungan negatif dengan keputusan etis dimana ketika tingkat relativisme meningkat, individu cenderung untuk menolak peraturan moral dalam berperilaku.

Kedua orientasi etis tersebut telah banyak digunakan dalam literatur etika

bisnis dan telah ditunjukkan untuk mempengaruhi variabel dalam pengambilan keputusan etis seperti penyimpangan organisasi, niat etis dan persepsi intensitas moral, sensitivitas etis, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan etika penghakiman (Fernando dan Chowdhury, 2010). Namun, belum banyak penelitian yang mengaitkan kedua orientasi filsafat moral tersebut dengan pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat idealisme seseorang, mereka akan mempersepsikan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat relativisme seseorang, mereka akan mempersepsikan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang etis. Maka hipotesis yang diuji adalah:

H₁: Tingkat idealisme berpengaruh negatif terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak.

H₂: Tingkat relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak.

Tingkat Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang diperoleh manusia adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Tuhan diimani sebagai Maha Baik, Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga setiap pemeluk agama tentunya berupaya agar bisa berperilaku sesuai dengan ajaran Tuhannya seperti yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama.

Religiusitas lebih melihat aspek yang “di dalam lubuk hati” riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, karena menapaskan intimitas jiwa, yakni cita rasa

yang mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia (Mus, 2009 dalam Zain dan Khu-luq, 2009). Dalam pengertian ini, religiusitas lebih dari sekedar agama yang tampak mata, formal dan resmi.

Menurut R. Stark dan C.Y. Glock dalam buku *American Pirty: The Nature of Religious Commitment* (1986) dalam Azizie (2008) religiusitas terdiri atas lima dimensi yaitu keyakinan agama, ibadah, pengetahuan agama, pengalaman agama dan konsekuensi dari keempat dimensi tersebut. Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin teologis, seperti percaya terhadap adanya Tuhan, surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian, ibadah merupakan cara melakukan penyembahan kepada Tuhan. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diukur dari berbagai dimensi. Pengalaman agama yaitu perasaan yang dialami oleh orang beragama seperti rasa bersyukur, takut, menyesal dan sebagainya. Dimensi yang terakhir adalah konsekuensi atas keempat dimensi sebelumnya.

Konsep religiusitas Glock dan Stark mencoba melihat keberagaman seseorang bukan hanya dari satu atau dua dimensi, tapi mencoba memperhatikan segala dimensi (Azizie, 2008). Keberagaman dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya termasuk unsur kepercayaan yang tak tampak mata. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula.

Dalam ajaran Islam istilah religius pengertiannya sepadan dengan istilah *aqidah*. Menurut Nashir Abdul Karim, *aqidah* menurut bahasa berasal dari kata *aqad*, 'ikatan', penguatan, pemantapan dan pengikatan dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, *aqidah* adalah keimanan yang teguh, yang tidak dihindangi suatu keraguan apa pun bagi pemilikinya.

Cunningham (1998) menyatakan bahwa religiusitas mengambil peranan yang penting dalam pengambilan keputusan etis. Penelitian telah menemukan bahwa tingkat religiusitas yang lebih tinggi akan berhubungan positif dengan perilaku etis, dan rendahnya tingkat religiusitas dikaitkan dengan kesediaan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Barnett et al, 1996; Kennedy dan Lawton, 1996 dalam Keller et al., 2007).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Clark dan Dawson, 1996; Fort, 1997), banyak mahasiswa yang menggunakan standar keagamaan dalam membuat keputusan etis. Ini terlihat sangat beralasan, karena agama biasanya merupakan standard yang paling konsisten yang dijunjung dalam membuat suatu keputusan. Oleh karena itu besar kemungkinan mahasiswa yang tinggi religiusitasnya lebih beretika dibandingkan dengan mahasiswa dengan tingkat religiusitas rendah. Hipotesa yang diuji adalah:

H₃: Tingkat religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak.

Gender

Dalam bahasa Inggris istilah gender diterjemahkan sebagai jenis kelamin. Sedangkan dalam bahasa latin gender berasal dari kata *genus* yang berarti ras, turunan, golongan, atau kelas. Nugroho (2008) mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/ zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum dan ekonomi.

Eagly (1987, dalam Meliyanah 2008) menyatakan bahwa wanita akan memberikan respon yang berbeda dengan pria terkait etika. Wanita lebih merefleksikan perhatian (*caring*) untuk orang lain,

tidak mementingkan diri sendiri dan berkeinginan bersatu dengan orang lain. Sedangkan pria lebih memandang nilai-nilai *agentic* yaitu pengembangan diri (*self-expansion*), penonjolan diri (*self-assertion*), kompetisi dan penguasaan (*mastery*). Perbedaan dari perkembangan moral dan cara pandang antara wanita dan pria ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis (Gilligan, 1982 dalam Meliyannah, 2008). Wanita umumnya lebih konservatif dalam kepercayaan mereka dan sikap mengenai penerimaan penyimpangan (Stack, 1998).

Smith dan Oakley (1997) menyatakan bahwa gender mempengaruhi persepsi seseorang dalam keputusan etis. Wanita umumnya lebih konservatif dalam kepercayaan mereka dan sikap mengenai penerimaan penyimpangan (Stack, 1998). Hal ini sesuai dengan temuan Deshpande (1997) dalam penelitiannya terhadap manajer wanita dan pria menemukan bahwa manajer wanita mempersepsikan penerimaan hadiah dalam pertukaran untuk preferensial jauh lebih tidak etis dibandingkan persepsi dari manajer pria.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang melihat pengaruh gender dalam persepsi etis, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Gender mempengaruhi persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang memiliki karakteristik populasi, dan representatif untuk mewakili keadaan populasi. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Mahasiswa S1 jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan dan Praktik Perpajakan; (2) Responden beragama Islam. Alasan memilih sampel pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin karena universitas ini merupakan tolok ukur (*benchmark*) di wilayah Banjarmasin bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Kalimantan.

Data diambil dengan menggunakan kuesioner yang berisi item-item pertanyaan untuk mengukur variabel penelitian. Kuesioner dirancang sedemikian rupa dengan mengadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu.

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	120	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	10	8.33%
Kuisisioner yang kembali	110	91.66%
Kuisisioner yang pengisiannya tidak lengkap	8	6.67%
Kuisisioner yang memenuhi syarat	102	85%

Sumber: Data Diolah

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Orientasi Etis (*Ethical Orientation*)

Ethical orientation adalah perspektif individu terhadap prinsip moral universal, yang dibagi menjadi dua yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme mengacu apabila individu percaya bahwa konsekuensi yang diinginkan selalu dapat diperoleh tanpa melanggar pedoman moral. Seorang yang idealis tidak akan memilih perilaku negatif yang dapat mengganggu orang lain. Sedangkan relativisme mengacu pada sejauh mana seorang individu menolak aturan moral universal untuk memandu perilaku.

Variabel *ethical orientation* akan diukur dengan instrumen Forsyth (1980) yang dikenal dengan *Ethics Position Questionnaire* (EPQ). EPQ terdiri atas 10 pertanyaan untuk mengukur tingkat idealisme dan 10 pertanyaan juga untuk mengukur tingkat relativisme. Respon jawaban mulai dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (7) “Sangat Setuju”. Alasan memilih instrumen Forsyth (1980) sebagai alat ukur variabel karena instrumen ini menjadi ukuran yang paling mapan dan telah teruji keandalannya dengan telah diadopsinya dalam banyak penelitian-penelitian internasional.

Tingkat Religiusitas

Tingkat religiusitas adalah kadar keimanan dan ketakwaan seorang Muslim kepada Allah SWT yang tidak hanya dilihat lewat aktivitas ritual (seperti shalat, puasa, membayar zakat, naik haji dan lain-lain), tetapi juga melihat pada aspek-aspek lain seperti perilaku, sikap, keyakinan, perasaan dan pengalaman.

Pengukuran tingkat religiusitas dalam penelitian ini menggunakan instrumen Allport dan Ross (1967) yaitu *Religious Orientation Scale* (ROS) yang telah dikembangkan oleh Khraim (2010). Pertanyaan kuesioner terdiri atas tiga bagian yaitu *Religious Education*, *Current Issue* dan *Sensitive Product* Dimensi-dimensi pengukuran yang ditawarkan oleh Khraim (2010) mencerminkan bahwa Islam adalah cara hidup yang lengkap dan bukan hanya sebagai aktivitas ritual dalam arti keagamaan yang sempit. Hal ini pula yang dijadikan alasan penggunaan instrumen tersebut dalam penelitian ini.

Gender

Gender merupakan variabel demografis yang akan dibedakan menurut jenis kelamin. Responden pria akan diberi notasi satu (1) dan responden wanita diberi notasi nol (0). Informasi mengenai gender dipero-

leh dari data demografi responden yang terdapat pada bagian akhir kuesioner.

Keputusan Etis dalam Penggelapan Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak. Pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral dapat diterima oleh masyarakat luas terkait dengan isu-isu penggelapan pajak. Variabel ini akan diukur dengan instrumen yang diadopsi dari Martin Crowe (1944) dengan 15 item pertanyaan dan dikembangkan oleh McGee et al., (2008) yang menambahkan 3 pertanyaan namun tidak sesuai dengan konteks Indonesia sehingga tidak diikutsertakan. Setiap item diukur dengan menggunakan skala likert mulai dari (1) untuk “Sangat Tidak Setuju” sampai (5) untuk “Sangat Setuju”.

Alasan memilih instrumen tersebut adalah karena telah banyak digunakan dalam studi-studi komparatif terkait penggelapan pajak di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia belum banyak penelitian yang berfokus pada etika penggelapan pajak khususnya yang mengacu pada instrumen tersebut.

Model Penelitian

Model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = keputusan etis penggelapan pajak

α = Koefisien konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi

X_1 = tingkat idealisme

X_2 = tingkat relativisme

X_3 = tingkat religiusitas

X_4 = gender

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Demografi responden

Gambaran mengenai data demografi responden dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Data Demografi Responden

Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	38	37.25%
Wanita	64	62.75%

Sumber: Data diolah

Statistik Deskriptif

Tabel 3 berikut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Min	Mak	Sum	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	102	3.87	5.33	469.93	0.53324
Idealisme	102	3.40	4.70	409.90	0.50732
Relativisme	102	3.30	4.80	419.10	0.62158
Tkt_Religiousitas	102	2.26	2.63	250.45	0.10324
Pria	102	0.00	1.00	38.00	0.48587
Wanita	102	0.00	1.00	64.00	0.48587

Sumber: Data diolah

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas untuk variabel Keputusan Etis Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan (PP1 sampai dengan PP15) terhadap total skor konstruk (Penggelapan_Pajak) menunjukkan hasil yang signifikan. Begitu juga untuk hasil uji validitas

variabel Idealisme (I1 sampai dengan I10) juga menunjukkan hasil korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan terhadap total skor konstraknya (I) kecuali untuk I10 dengan skor sebesar 0.126 yang tidak signifikan dan dikeluarkan dari model penelitian. Kemudian hasil pengujian validitas terhadap variabel Relativisme menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan (R1 sampai dengan R10) terhadap total skor konstruk (R) diperoleh hasil yang signifikan. Hasil uji validitas untuk variabel Tingkat Religiusitas yang terdiri dari tiga konstruk yaitu RE, CI dan SP diperoleh hasil yang signifikan untuk semua pertanyaannya (RE1 sampai dengan RE4), (CI1 sampai dengan CI13) dan (SP1 sampai dengan SP20).

Hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel juga menunjukkan hasil yang reliabel. Nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan adalah 0.778 untuk variabel Penggelapan_Pajak, 0.922 untuk variabel Idealisme, 0.975 untuk variabel Relativisme, 0.890 untuk konstruk RE, 0.967 untuk konstruk CI dan 0.940 untuk konstruk SP telah memenuhi kriteria > 0.7 (Nunnally, 1994) sehingga variabel Keputusan Etis Penggelapan Pajak, Idealisme, Relativisme dan Tingkat Religiusitas yang digunakan telah reliabel.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel output SPSS 17 di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.599	.457		-21.001	.000
I	-.002	.026	-.002	-.090	.928
R	.208	.025	.242	8.417	.000
Tkt_Religiusitas	5.452	.154	1.055	35.439	.000
DPria	-.065	.028	-.059	-2.324	.022

a. Dependent Variable: Penggelapan_Pajak

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Hipotesis pertama (H₁) menguji tingkat idealisme terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak. Dalam tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel I tidak signifikan dengan $p < 0.05$ ($p = 0.928$). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat idealisme seseorang tidak terbukti dapat memberikan persepsi bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis. Mereka menilai bahwa isu-isu penggelapan pajak sah-sah saja atau etis-etis saja diambil walau memiliki tingkat idealisme yang tinggi. Mereka yang selama ini percaya bahwa konsekuensi yang diinginkan selalu dapat diperoleh tanpa melanggar pedoman moral mungkin saja menilai bahwa penggelapan pajak bukan merupakan perilaku yang melanggar pedoman moral tersebut. Temuan ini tidak sejalan dengan Forsyth (1980) yang menyebutkan bahwa idealisme menjadi ukuran yang populer dalam memprediksi penilaian moral (*moral judgement*).

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Hipotesis kedua (H₂) menguji tingkat relativisme terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak. Dalam tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel R signifikan dengan $p < 0.05$ ($p = 0.000$) dan dapat disimpulkan H₂

terdukung secara statistik. Semakin tinggi tingkat relativisme seseorang, mereka akan mempersepsikan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang etis. Seseorang dengan tingkat relativisme yang tinggi akan menilai bahwa penggelapan pajak adalah keputusan yang etis. Temuan ini sejalan dengan Yetmar dan Eastman (2000) yang menyebutkan bahwa orientasi etis khususnya relativisme tidak berpengaruh pada keputusan etis. Relativisme mempunyai hubungan negatif dengan keputusan etis dimana ketika tingkat relativisme meningkat, individu cenderung untuk menolak peraturan moral dalam berperilaku.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Hipotesis ketiga (H₃) menguji tingkat religiusitas terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak. Tabel 4 menunjukkan bahwa H₃ signifikan dengan $p < 0.05$ ($p = 0.000$) dan dapat disimpulkan bahwa H₃ terdukung. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, mereka akan mempersepsikan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Clark dan Dawson (1996); Fort (1997) yang menemukan banyak mahasiswa yang menggunakan standar keagamaan dalam membuat keputusan etis. Ini terlihat sangat beralasan, karena agama biasanya merupakan

standar yang paling konsisten yang dijunjung dalam membuat suatu keputusan. Oleh karena itu besar kemungkinan mahasiswa yang tinggi religiusitasnya lebih beretika dibandingkan dengan mahasiswa dengan tingkat religiusitas rendah.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₄)

Hipotesis ketiga (H₄) menguji gender terhadap persepsi pengambilan keputusan etis penggelapan pajak. Tabel 4 menunjukkan bahwa H₄ signifikan dengan $p < 0.05$ ($p = 0.022$) dan dapat disimpulkan bahwa H₄ terdukung. Baik responden pria maupun responden wanita terbukti berpengaruh terhadap keputusan etis penggelapan pajak. Artinya, mereka baik pria maupun wanita menilai bahwa penggelapan pajak merupakan keputusan yang tidak etis. Responden wanita terbukti 6.5% lebih tinggi menilai bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis dibandingkan dengan responden pria. Hal ini sejalan dengan temuan Eagly (1987); Stack (1998); Smith dan Oakley (1997) dan Deshpande (1997) yang menyatakan bahwa wanita akan memberikan respon yang lebih konservatif terkait pengambilan keputusan etis.

SIMPULAN

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem *self assessment* bertumpu pada *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) yang dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak. Salah satu bentuk perlawanan aktif yang dilakukan dalam bentuk perbuatan langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan mengurangi pajak yaitu *tax evasion* atau penggelapan pajak. Peng-

gelapan pajak dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan.

Selain karena sifat pemungutannya yang sukarela, penggelapan pajak timbul akibat dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah dan sistem hukum. Bagi negara tindakan penggelapan pajak sangat merugikan, karena pendapatan yang seharusnya masuk kedalam kas negara yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia malah jatuh ke tangan yang tidak semestinya. Namun bagaimana jika dilihat dari sudut pandang etika, apakah penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak etis.

Penelitian ini ingin melihat hubungan antara orientasi etis (*ethical orientation*) yang ditandai dengan idealisme dan relativisme dengan pengambilan keputusan etis dalam penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian McGee et al. (2008) dengan memasukkan faktor-faktor individual seperti gender dan tingkat religiusitas yang oleh Keller et al. (2007) telah diteliti sebagai faktor penentu pengambilan keputusan etis.

Penelitian ini memberikan satu bukti bahwa ternyata idealisme yang merupakan unsur orientasi etis tidak terbukti berhubungan negatif dengan persepsi keputusan etis penggelapan pajak. Seseorang dengan tingkat idealisme yang tinggi akan memberikan persepsi bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang etis. Sedangkan relativisme yang juga merupakan unsur orientasi etis terbukti berhubungan positif dengan persepsi keputusan etis penggelapan pajak. Seseorang dengan tingkat relativisme yang tinggi akan menilai bahwa penggelapan pajak adalah keputusan yang etis. Tingkat religiusitas terbukti berhubungan negatif dengan persepsi keputusan etis penggelapan pajak. Gender juga terbukti mempengaruhi persepsi keputusan etis penggelapan pajak dimana responden wanita

terbukti 6.5% lebih tinggi menilai bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis dibandingkan dengan responden pria.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Azizie, H. (2008). *Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat oleh para Muzakki*. Universitas Gadjah Mada.
- Clark, J. W., & Dawson, L. E. (1996). Personal religiousness and ethical judgements: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 15(3), 359–372. <https://doi.org/10.1007/BF00382959>
- Cunningham, W. P. (1998). The Golden Rule as Universal Ethical Norm. *Journal of Business Ethics*, 17(1), 105–109. <https://doi.org/10.1023/A:1005752411193>
- Deshpande, S. P. (1997). Managers' Perception of Proper Ethical Conduct: The Effect of Sex, Age, and Level of Education. *Journal of Business Ethics*, 16(1), 79–85. <https://doi.org/10.1023/A:1017917420433>
- Fernando, M., & Chowdhury, R. M. M. I. (2010). The Relationship Between Spiritual Well-Being and Ethical Orientations in Decision Making: An Empirical Study with Business Executives in Australia. *Journal of Business Ethics*, 95(2), 211–225. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0355-y>
- Fernando, M., Dharmage, S., & Almeida, S. (2008). Ethical Ideologies of Senior Australian Managers: An Empirical Study. *Journal of Business Ethics*, 82(1), 145–155. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9568-0>
- Forsyth, D. R. (1980). A Taxonomy of Ethical Ideologies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(1), 175–184.
- Fort, T. L. (1997). Religion and Business Ethics: The Lessons from Political Morality. *Journal of Business Ethics*, 16(3), 263–273. <https://doi.org/10.1023/A:1017935210929>
- Gordon, J. (1993). *A Diagnostic Approach Organization Behavior* (4th ed.). A Division of Simon and Schuster.
- Hunt, S. D., & Vitell, S. (1986). A General Theory of Marketing Ethics. *Journal of Macromarketing*. <https://doi.org/10.1177/027614678600600103>
- Husein, M. F. (2003). *Keterkaitan Faktor-Faktor Organisasional, Individual, Konflik Peran, Perilaku Etis dan Kepuasan Kerja Akuntan Manajemen*. Universitas Gadjah Mada.
- Jones, T. M. (1991). Ethical Decision Making by Individuals in Organizations. *The Academy of Management Review*, 16(2), 366–395. <https://doi.org/10.5465/AMR.1991.4278958>
- Keller, A. C., T. Smith, K., & Smith, L. M. (2007). Do gender, educational level, religiosity, and work experience affect the ethical decision-making of U.S. accountants? *Critical Perspectives on Accounting*, 18(3), 299–314.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khraim, H. (2010). Measuring Religiosity in Consumer Research From an Islamic Perspective. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 26(1), 52–78. <https://doi.org/10.1108/10264116201000003>
- Matlin, M. W. (1998). *Cognition* (4th ed.). New York: Harcourt Brace College Publisher.
- McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. (2008). A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong kong vs the united states. *Journal of*

- Business Ethics*, 77(2), 147–158.
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9304-1>
- Meliyanah. (2008). *Persepsi Etis Mahasiswa Terhadap Praktik Earning Manajemen*. Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P. (1997). *Perilaku Organisasi (diterjemahkan oleh Pujaatmaka)*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sitanala, T. F. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Skeptisisme Auditor*. Universitas Gadjah Mada.
- Smith, P. L., & Oakley, E. F. (1997). Gender-Related Differences in Ethical and Social Values of Business Students: Implications for Management. *Journal of Business Ethics*, 16(1), 37–45.
<https://doi.org/10.1023/A:1017995530951>
- Song, Y., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Administration Review*, 38(5), 442–452. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/975503>
- Stack, S. (1998). Gender, Marriage, and Suicide Acceptability: A Comparative Analysis. *Sex Roles*, 38(7), 501–520.
<https://doi.org/10.1023/A:1018770124576>
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. *The Academy of Management Review*, 11(3), 601–617.
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). *Behavioral ethics in organizations: A review*. *Journal of Management* (Vol. 32).
<https://doi.org/10.1177/0149206306294258>
- Utami, T. G., & Widodo, A. (2015). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 96–105.
- UU No 28 Tahun 2007. (2007). Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Varosi, T. R., Klamm, B. K., & McCrohan, K. F. (2000). The Effect of a Salient Tax Avoidance Situation On Propensity to Evade Income Taxes. *Research On Accounting Ethics*, 7, 65–81.
- Velasquez, M. G. (2006). *Business Ethics Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
- Yetmar, S. A., & Eastman, K. K. (2000). Tax Practitioners' Ethical Sensitivity: A Model and Empirical Examination. *Journal of Business Ethics*, 26(4), 271–288.
<https://doi.org/10.1023/A:1006294517573>
- Zain, L., & Khuluq, L. (2009). Gus Mus: Satu Rumah Seribu Pintu. *LKis*, 21.